

Fitryane Lihawa  
Syarwani Canon  
Sri Maryati



# **Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo:**

***Integrasi Kebijakan dan Kajian lingkungan Hidup Strategis***

Editor:

Cokro R. Katili (Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo)  
Anita Hippy (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo)

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN  
GORONTALO: Integrasi Kebijakan dan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis

Fitryane Lihawa  
Syarwani Canon  
Sri Maryati



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GORONTALO:  
Integrasi Kebijakan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penulis:

Fitryane Lihawa  
Syarwani Canon  
Sri Maryati

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Cokro R. Katili (Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo)  
Anita Hippy (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo)

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 243, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN : 62-415-7460-813

Cetakan Pertama:

Maret 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2025 by Tahta Media Group**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku "*Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Kabupaten Gorontalo, serta sebagai referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Kabupaten Gorontalo, sebagai bagian dari pembangunan nasional, memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai capaian SDGs di daerah ini, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat luas dalam memahami serta mengambil langkah nyata menuju pembangunan yang lebih baik. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami terbuka untuk kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk data, analisis, maupun dukungan lainnya. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

**Gorontalo, 3 Maret 2025**  
Penyusun

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum dan Kebijakan.....	2
1.3 Metodologi dan Pendekatan .....	6
BAB II KONDISI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO .....	15
2.1 Kondisi Geografis.....	15
2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	47
2.3 Peta Wilayah Fungsional .....	65
2.4 Kondisi Demografi .....	67
2.5 Kondisi Ekonomi .....	83
2.6 Potensi Daerah.....	109
2.7 Kondisi Keselamatan, Mutu Hidup, dan Kesejahteraan Kabupaten Gorontalo .....	115
2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	118
BAB III INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	122
3.1 Capaian Pilar Sosial di Kabupaten Gorontalo .....	127
3.2 Capaian Pilar Ekonomi di Kabupaten Gorontalo .....	129
3.3 Capaian Pilar Lingkungan di Kabupaten Gorontalo.....	131
3.4 Capaian Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kabupaten Gorontalo .....	132

3.5	Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	133
3.6	Target dan Indikator Pencapaian TPB pada masing-masing OPD	134
3.7	Analisis Capaian Indikator Berdasarkan Daya Dukung	155
BAB IV ANALISIS DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN		179
4.1	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah	179
4.2	Alternatif dan Rekomendasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Upaya Tambahan	198
4.3	Alternatif Skenario Tanpa Upaya Tambahan	225
BAB V IMPLEMENTASI DAN ARAH KEBIJAKAN		227
5.1	Arah Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Gorontalo	227
5.2	Rencana Implementasi Program Program dan Pendanaan Mitra Pemerintah	229
BAB VI PENUTUP		239
6.1	Kesimpulan	239
6.2	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gorontalo	239
DAFTAR PUSTAKA		242

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Gorontalo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Limboto. Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran kedua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara (P. K. Gorontalo 2024).

Hari lahir Kabupaten Gorontalo ditetapkan pada tanggal 26 November 1673. Penetapan ini didasarkan pada penandatanganan perjanjian ikatan keluarga lima kerajaan yang disebut U Duluwo Limo lo Pohala'a. Kelima kerajaan tersebut yakni Kerajaan Gorontalo, Limboto, Suwawa, Boalemo dan Atinggola. Kelima kerajaan tersebut selanjutnya menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum *Limo lo Pohala'a* dengan empat unsur yakni wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan.

Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi dengan ibu kota di Isimu. Pada Tahun 1978 ibu kota dipindahkan ke Limboto (BPS 2022).

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus global dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Di Indonesia, prinsip ini diintegrasikan melalui berbagai kebijakan strategis nasional dan daerah, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo, menetapkan RPJPD tahun 2025-2045 yang memerlukan

---

---

# BAB II

## KONDISI WILAYAH

# KABUPATEN GORONTALO

---

---

Kabupaten Gorontalo sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Saat pembentukan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kota Gorontalo.

### 2.1 KONDISI GEOGRAFIS

#### 2.1.1 Batas Administrasi

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 2.125,47 km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kabupaten Gorontalo terletak di antara 0° 30' – 0° 54' LU dan 122° 07' – 123° 44' BT. Batas-batas wilayah Kabupaten Gorontalo adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara d
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Timur : Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo
- Sebelah Barat : Kabupaten Boalemo

Mengacu BPS Kabupaten Gorontalo (2024), secara administratif Kabupaten Gorontalo meliputi 19 kecamatan, 192 desa, dan 14 kelurahan. Luasan setiap kecamatan di Kabupaten Gorontalo disajikan pada Tabel 4.

---

---

# BAB III

## INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

---

---

Analisis tujuan Pembangunan berkelanjutan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Meta Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Edisi 1.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari 17 tujuan sebagai berikut

- Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
- Tujuan 2 : Tanpa Keparan
- Tujuan 3 : Kehidupan Sehat Sejahtera
- Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
- Tujuan 5 : Kesetaraan gender
- Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
- Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
- Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman Berkelanjutan
- Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
- Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
- Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
- Tujuan 15 : Ekosistem Daratan
- Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

(Nasional/Bappenas, 2017)

---

---

# BAB IV

## ANALISIS DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

---

---

Perumusan alternatif skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil analisis hubungan antara kesenjangan (gap) pencapaian TPB dengan TPB lainnya. Terdapat 3 kondisi Gap, yaitu: lebih atau sama atau kurang dari target/indikator TPB. Kondisi gap lebih atau sama, maka Daerah tidak perlu melakukan intervensi tetapi “mempertahankan” kondisi tersebut. Sedangkan untuk kondisi gap kurang, maka Daerah perlu melakukan intervensi (Kemendagri, 2018).

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka dilakukan proyeksi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga Tahun 2045. Perumusan alternatif skenario dan rekomendasi dilakukan dengan berbagai metode, yaitu konsultasi publik, kajian literatur, dan rapat terbatas diantara tim kelompok kerja KLHS dan tim penyusun RPJPD Kabupaten Gorontalo

### **4.1 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG DAERAH**

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT-LH) dilakukan untuk mendapatkan gambaran indikatif potensi sumberdaya alam beserta jasa ekosistem yang terdapat dalam suatu wilayah, termasuk pembatas atas potensi sumberdaya alam dimaksud. Analisis daya dukung dilakukan terhadap daya dukung pangan dan daya dukung air di Kabupaten Gorontalo

#### **4.1.1 Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Pangan**

Analisis daya dukung pangan meliputi perhitungan ketersediaan pangan, perhitungan kebutuhan pangan, perhitungan ambang batas dan perhitungan selisih antara ambang batas dan populasi. Hasil analisis prediksi

---

---

# BAB V

## IMPLEMENTASI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

---

### 5.1 ARAH VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN GORONTALO

Visi Pembangunan daerah adalah pandangan jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Visi ini menggambarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam rentang waktu Pembangunan tertentu. Berdasarkan hasil analisis tujuan pembangunan berkelanjutan, dan potensi sumber daya alam di Kabupaten Gorontalo, maka tawaran visi untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo ditunjukkan pada **Tabel 101**.

**Tabel 101.** Tawaran Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Gorontalo

Visi RPJMD 2005 – 2025 Kabupaten Gorontalo Sejahtera dan Mandiri		Visi RPJPD 2025-2045 Kabupaten Gorontalo Maju dan Berkelanjutan berbasis sumber daya pertanian, peternakan, perikanan & pariwisata	
Tawaran Pokok 2025 – Misi RPJPD 2045			
01	02	03	04
Transformasi Ekonomi	Transformasi Sosial dan Ketahanan Budaya	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya	Tranformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan

---

---

# BAB VI

## PENUTUP

---

---

### 6.1 KESIMPULAN

Evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Gorontalo dilakukan berdasarkan perbandingan dengan target nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 220 indikator yang dievaluasi:

- 63 indikator (28,64%) telah mencapai target nasional.
- 62 indikator (28,18%) telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional.
- 15 indikator (6,82%) belum dilaksanakan.
- 80 indikator (36,36%) tidak memiliki data.

Beberapa pencapaian signifikan dan tantangan utama dalam pelaksanaan SDGs di Kabupaten Gorontalo adalah:

- **Keberhasilan:** Pencapaian tertinggi terdapat pada *Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera* dengan 11 indikator yang telah mencapai target nasional.
- **Kendala:** *Tujuan 3* juga menjadi sektor dengan indikator tertinggi yang belum mencapai target nasional (16 indikator). Indikator lainnya yang banyak belum mencapai target adalah dari *Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan*, *Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak*, dan *Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas*.

Beberapa indikator belum memiliki data, terutama dalam *Tujuan 15 (Ekosistem Daratan)*, *Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan)*, dan *Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)*.

### 6.2 REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GORONTALO

Berdasarkan evaluasi SDGs, rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup beberapa aspek utama:

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

---

- BAPPENAS. (2020a). *Meta Data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2020b). *Meta Data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2020c). *Meta Data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS.
- Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo. (2023). *Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo*.
- Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo. (2019). *Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 - 2032*.
- DLHK, Provinsi Gorontalo. (2024). *Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD 2025-2045 Provinsi Gorontalo*.
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2016). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2016*.
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2017). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2017*.
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2018). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2018*.
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2019). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2019*.
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2020). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2020*.
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2021a). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2021*.
- BBPD Kabupaten Gorontalo. (2021b). *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 - 2025*.
- BPS Kabupaten. (2022). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2022*.

- BPS Kabupaten Gorontalo. (2023). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2023*.
- BPS KabupatenGorontalo. (2024). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2024*.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2018). *Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJMD*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. (2023). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023*.  
<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, K. P. P. (2017). *Terjemahan Tujuan dan Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's)*. BAPPENAS.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 / 2017 Full, Pub. L. No. 1312, 6 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1939 (2017).
- UNESCAP. (2024). *Asia and The Pacific SDG Progress Report, Showcasing Transformative Actions 2024*. United Nation Publication.
- Yusuf, A. A., & Komarulzaman, A. (2022). Measuring the Distance to 2030 Targets in Indonesia Which SDGs That Indonesia Need to Prioritize? A Distance-to-Target Approach. In *Sustainable Development Goals and Pandemic Planning* (pp. 221–288). Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-6734-3\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-16-6734-3_5)

Buku *Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo: Integrasi Kebijakan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* disusun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Kabupaten Gorontalo. Fokus utama penulisan buku ini adalah integrasi kebijakan pembangunan dan kajian lingkungan hidup strategis. Buku ini memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Kabupaten Gorontalo, sebagai bagian dari pembangunan nasional, memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan seperti degradasi ekosistem, perubahan iklim, serta risiko bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah menerapkan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Kajian ini memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan daerah.

Buku ini terdiri dari beberapa bagian utama:

#### 1. Analisis Kondisi Wilayah

Membahas aspek geografis, topografi, hidrologi, demografi, serta kondisi sosial-ekonomi Kabupaten Gorontalo. Tinjauan ini mencakup peran sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta industri dalam perekonomian daerah.

#### 2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Buku ini merinci hasil pencapaian SDGs di Kabupaten Gorontalo, yang terbagi dalam empat pilar utama:

- o **Pilar Sosial:** mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
- o **Pilar Ekonomi:** menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya, serta kesejahteraan petani dan nelayan.
- o **Pilar Lingkungan:** mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan, status kualitas udara, air, dan lahan, serta mitigasi perubahan iklim.
- o **Pilar Hukum dan Tata Kelola:** membahas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

#### 3. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan

Buku ini menawarkan berbagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk strategi mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya air dan pangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### 4. Implementasi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi implementasi program pembangunan berkelanjutan, pendanaan yang diperlukan, serta peran berbagai pihak dalam mendukung pencapaian target SDGs hingga tahun 2045.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, buku ini merekomendasikan beberapa kebijakan strategis, antara lain:

- Penguatan tata kelola lingkungan berbasis data dan teknologi.
- Pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan.
- Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air secara efisien.
- Penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, serta masyarakat dalam memahami dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Gorontalo yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



IKAPI

CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedia  
Telp/WA : +62 896-5427-3996



62-415-7460-813